

# DAKWAH MILENIAL

Dari Kajian Doktrinal  
Menuju Transformasi Sosial

Editor:  
AHMAD IZUDIN  
BAYU MITRA A. KUSUMA





Katalog Dalam Terbitan (KDT)

© PSDT

*Dakwah Milenial: Dari Kajian Doktrinal Menuju Transformasi Sosial/*  
Yogyakarta: PSDT & Samudra Biru, 2017.  
xiv + 241 hlm.; 16 x 24 cm  
ISBN : 978-602-6295-97-2

I. Sosial

II. Agama

III. Judul

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Editor :

1. Ahmad Izudin
2. Bayu Mitra A. Kusuma

Penulis :

1. A. Said Hasan Basri
2. Ahmad Izudin
3. Arin Mamlakah Kalamika
4. Bayu Mitra A. Kusuma
5. Muhammad Izzul Haq
6. Munif Solikhan
7. Widowati Maisarah
8. Abdur Rozaki
9. Alimatul Qibtiyah
10. Aris Risdiana
11. M. Amin Abdullah
12. Moh Khaerul Anwar
13. Nanang M. Hasyim
14. Noorkamilah
15. Zaen Musyrifin

Design Cover : Samudra Biru  
Layouter : Ahmad Izudin

Cetakan I, November 2017

Diterbitkan Oleh:

**Pusat Studi Dakwah dan Transformasi Sosial (PSDT)**  
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga**

Bekerjasama dengan:

**Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)**  
Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno Blok B No. 15  
RT 12 RW 30 Banguntapan Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55198  
e-mail: psambiru@gmail.com  
www.samudrabiru.co.id/www.cetakbuku.biz  
Phone: 0813-2752-4748

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN — v

PENGANTAR KETUA PSDT — vii

PENGANTAR EDITOR — ix

DAFTAR ISI — xiii

### *Perspektif Dakwah Milenial*

- VISI DAKWAH DI ERA MILENIUM BARU: *Fresh Ijtihad* Memperjumpakan *Ulum al-Din* dan Sains Modern dalam Keilmuan Dakwah dan Komunikasi — 3  
*M. Amin Abdullah*
- *DA'WAH STUDIES*: Jejak Pemikiran dan Orientasi Penelitian — 33  
*Abdur Rozaki*

### *Dakwah, Pembangunan Sosial, dan Kebijakan Publik*

- PEMBANGUNAN, *CIVIL SOCIETY*, DAN ISLAM: Gerakan Dakwah Menuju Transformasi Sosial — 47  
*Ahmad Izudin*
- PEKERJAAN SOSIAL BERBASIS DAKWAH: Sebuah Nalar Aksi Menuju Dakwah Transformatif — 71  
*Muhammad Izzul Haq*
- ARGUMEN INTEGRASI-INTERKONEKSI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL — 83  
*Noorkamilah*
- KEBIJAKAN PUBLIK PRO DAKWAH: Strategi dalam Mengawal Transisi Masyarakat — 97  
*Bayu Mitra A. Kusuma*



## *Dakwah, Komunikasi, dan Kepemimpinan Islam*

- SENSITIVITAS GENDER DAN ASERTIVITAS BERKOMUNIKASI DALAM BERDAKWAH — 113  
*Alimatul Qibtiyah*
- MEMBEDAH PARADIGMA DAKWAH DALAM PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI — 129  
*Nanang Mizwar Hasyim*
- KONTROVERSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA: Antara Dakwah dan Komunikasi Politik — 145  
*Widowati Maisarah*
- NAHDLATUL ULAMA DAN PILAR KEBANGSAAN: Analisa Framing Pencegahan Gerakan Ekstrimisme bagi Pemuda Indonesia — 155  
*Arin Mamlakah Kalamika*
- KEPEMIMPINAN DALAM LINGKUP STUDI MANAJEMEN DAKWAH — 167  
*Munif Solikhan*

## *Dakwah, Budaya Organisasi, dan Konseling Kontemporer*

- KONSELING SEBAGAI PENDEKATAN DAKWAH: Sebuah Strategi Alternatif — 181  
*Zaen Musyrifin*
- MENEMUKENALI MODEL PENDEKATAN DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM — 191  
*A. Said Hasan Basri*
- KARAKTER DAN IDENTITAS BUDAYA ORGANISASI DALAM LEMBAGA DAKWAH — 205  
*Aris Risdiana*
- BERDAKWAH MELALUI PENDEKATAN KONSELING EKOLOGI — 217  
*Moh Khaerul Anwar*

INDEKS — 229

BIOGRAFI PENULIS — 233

# ARGUMEN INTEGRASI-INTERKONEKSI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Noorkamilah

## Pendahuluan

Betapapun akar sejarah ilmu kesejahteraan sosial lahir dan berkembang di Eropa<sup>1</sup>, akan tetapi secara keilmuan ia lahir dan berkembang di Amerika<sup>2</sup>. Berkembangnya profesi pekerjaan sosial ke dunia ketiga seperti Indonesia, adalah hasil dari perjumpaan pertama antara konsep kesejahteraan sosial dengan gagasan modernisasi, begitu juga ekspansi industrialisasi ekonomi yang telah diperkenalkan oleh negara-negara maju di dunia pertama.<sup>3</sup> Rupanya sebagai suatu praktik pertolongan, apa yang di Barat saat itu telah menjadi suatu profesi<sup>4</sup>, pada saat yang sama ternyata telah menjadi tradisi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya mekanisme tertentu di masyarakat yang khas, yang dengan itu masyarakat menjadi mampu bertahan hidup dan

---

<sup>1</sup> Ditandai dengan adanya aktivitas volunteerism dalam masyarakat gereja dan adanya intervensi pemerintah yang dilakukan oleh Ratu Elizabeth pada tahun 1601 dengan dikeluarkannya undang-undang anti kemiskinan (Elizabethan Poor Law), lihat Charles Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare, Empowering People* (USA: Brook/cole, Thompson Learning, 2004), hal. 45-47.

<sup>2</sup> Lihat Charles Zastrow; *ibid*; lihat juga, Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan Sosial, Paradigma dan Teori*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012), hal. 18.

<sup>3</sup> Budi Rahman Hakim, *Rethinking Social Work Indonesia: Suatu Jelajah Kritis*, (Jakarta: RM Books, 2010), hal. 43.

<sup>4</sup> Pekerjaan sosial dianggap resmi menjadi sebuah disiplin ilmu pada tahun 1898, ditandai dengan adanya standarisasi metode dalam melakukan pertolongan, yang diperoleh melalui sekolah pelatihan untuk filantropi terapan (*the school training of applied philanthropy*) yang kemudian menjadi cikal bakal dibukanya kelas pekerjaan sosial (*social work courses*), dan adanya standarisasi gaji atau upah bagi para pekerja kemanusiaan ini. Lihat, Budi Rahman Hakim, *Rethinking Social Work Indonesia: Suatu Jelajah Kritis*.



menghadapi berbagai permasalahan dengan baik.<sup>5</sup>

Tidak mengherankan bila kemudian dalam perkembangan selanjutnya, ilmu ini pun dapat diterima dan berkembang bahkan menjadi program studi tersendiri di Indonesia.<sup>6</sup> Salah satu perguruan tinggi yang kemudian membuka program studi ini adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tepatnya pada tahun 2009. Dibukanya prodi baru yang paling 'tidak Islami' ini<sup>7</sup> di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang mengandung konsekuensi tidak sederhana. Prodi ini harus dapat membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang notabene jelas-jelas 'Islami'.

Sebenarnya sebagai sebuah tradisi, praktik-praktik pekerjaan sosial telah biasa dilakukan dalam masyarakat Islam sejak periode awal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah tradisi, kesejahteraan sosial bukanlah sesuatu yang asing atau baru, melainkan sebaliknya, merupakan tradisi yang telah diwariskan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, sebagai seorang muslim, untuk menunjukkan cinta kepada Rasulullah SAW, diwajibkan untuk senantiasa menjalankan apa yang dicontohkan dan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka sebenarnya praktik kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW., itu semestinya juga dijalankan oleh

---

<sup>5</sup> Ada tiga hal yang mendukung hal ini, yakni, 1) secara historis Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya, 2) sebelum kolonialisme terjadi, mayoritas rakyat Indonesia berafiliasi dengan tiga tradisi keagamaan yang berbeda, (Hindu, Budha, Islam) yang memiliki tradisi kuat bagi kegiatan kedermawanan dan filantropi, 3) secara historis, bangsa Indonesia telah ditanamkan dengan suatu rasa kemasyarakatan yang kuat. Lihat Budi Rahman Hakim, *Rethinking Social Work Indonesia: Suatu Jelajah Kritis*, ... hal. 74-77.

<sup>6</sup> Mulai tahun 1960-an, beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia mulai membuka program studi ilmu kesejahteraan sosial, seperti UMM Malang, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Negeri Jember, dll. Lihat, T. Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, cet. 2, (Yogyakarta: PT Hanindita, 1987), hal. 168-169.

<sup>7</sup> Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Kalijaga memiliki lima Prodi, yakni Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Bimbingan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah (MD), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dan terakhir Prodi Ilmu kesejahteraan Sosial (IKS). Dari kelima prodi tersebut, hanya IKS yang 'I'nya bukan Islam' sebagaimana yang lain, melainkan Ilmu. Sehingga muncul rumor bahwa IKS sebagai prodi yang paling 'tidak Islami' di Fakultas ini. Banyak pihak yang mempertanyakan mengapa IKS masuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bukannya di FISHUM yang memiliki rumpun keilmuan yang lebih dekat.



seluruh umat Islam di dunia.

Akan tetapi sebagai sebuah bangunan ilmu, tidak dapat dipungkiri bahwa Ilmu Kesejahteraan Sosial secara keilmuan lahir, tumbuh dan berkembang di Amerika. Tak ayal, berbagai hal terkait pengembangan ilmu ini sangat kental dengan tradisi Barat—dalam hal ini Amerika dan Eropa. Terlebih Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah ilmu terapan, yang objek materialnya adalah manusia sebagai individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, lengkap dengan latar belakang sosial yang melingkupinya. Maka menjadi suatu keniscayaan jika contoh-contoh penerapan ilmu ini dalam berbagai literatur akan ditemukan *setting* Amerika dan Eropa.<sup>8</sup> Padahal, kondisi sosial budaya di Eropa dan Amerika sangatlah berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga ilmu ini dapat dengan 'luwes' diterapkan di Indonesia—tentunya dengan latar belakang ke-Indonesiaan yang khas. Proses penyesuaian ini disebut oleh Kanya sebagai proses indigenisasi pekerjaan sosial.<sup>9</sup> Dengan mengutip Ling How Kee (2007), Kanya mengartikan indigenisasi sebagai proses mengadaptasikan praktik pekerjaan sosial agar sesuai dengan budaya dan sifat masalah-masalah sosial di negara-negara berkembang.<sup>10</sup> Hal ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat tanpa proses penyesuaian ini, boleh jadi akan terjadi ketidakrelevanan ilmu yang dapat memunculkan masalah lain, seperti ketidaksesuaian antara asumsi dengan kenyataan, artinya teori yang digunakan tidak dapat diterapkan; keterasingan; pengulangan konsep, mistifikasi atau kekeliruan dan mediokritas.<sup>11</sup> Menurut Alatas (2003), sebagaimana dikutip oleh Kanya, proses penyesuaian ini lebih merupakan pengakuan terhadap perlunya menemukan penyesuaian atau mengupayakan alternatif yang relevan. Indigenisasi tidak mempertimbangkan semua tradisi ilmu sosial dari Barat sebagai tidak

<sup>8</sup> Ambillah salah satu contoh misalnya, buku *Introduction to Social Work and Social Welfare* yang ditulis oleh Charles Zastrow (2004), sebuah buku yang dianggap sebagai buku 'babon', buku yang menjadi rujukan utama berbagai sekolah/pendidikan kesejahteraan/pekerjaan sosial di Indonesia. Dalam buku ini, berbagai contoh penanganan kasus, bidang-bidang dan isu-isu yang ditangani, serta contoh-contoh program yang dilaksanakan, keseluruhannya menggunakan *setting* Amerika, tempat di mana ilmu ini lahir, berkembang dan menjadi sebuah ilmu yang cukup mapan dan mendapat pengakuan besar dari masyarakat dewasa ini.

<sup>9</sup> Kanya Eka Santi, "Indigenisasi Pekerjaan Sosial", dalam Salim Segaf Al-Jufri, *Pekerjaan Sosial di Indonesia, Sejarah dan Dinamika perkembangan*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012), hal. 41.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 41

<sup>11</sup> Kanya, "Indigenisasi Pekerjaan Sosial", ... hal. 41.



relevan dan juga tidak menolak pengetahuan yang lahir dari keasliannya. Ide besarnya adalah bahwa ilmu sosial dari Barat *indigenous* untuk setting mereka sendiri dan panggilan untuk relevansi berarti memberikan sumbangan terhadap universalisasi terhadap ilmu-ilmu sosial.<sup>12</sup>

Demikian pula dengan diterimanya ilmu ini dalam khasanah keilmuan Islam, perlu kiranya dilakukan berbagai upaya penyesuaian. UIN Sunan Kalijaga betul-betul menyadari pentingnya proses penyesuaian ini, sehingga seiring dengan adanya perubahan institusi dari Institut (IAIN) ke universitas (UIN), mulai tahun 2004 UIN Sunan Kalijaga menerapkan paradigma integrasi-interkoneksi sebagai *icon* perubahan IAIN menjadi UIN. Salah satu pengejawantahan dari paradigma integrasi-interkoneksi ini adalah mengintegrasikan Islam dalam berbagai keilmuan 'umum', termasuk dalam hal ini adalah ilmu kesejahteraan sosial. Sehingga sebenarnya, upaya-upaya mengintegrasikan Islam dalam ranah keilmuan kesejahteraan sosial telah dimulai sejak awal pendirian prodi ini, bahkan sejak sebelum itu.<sup>13</sup>

Di antara unsur integrasi yang dilakukan adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam materi perkuliahan. Salah satunya adalah dalam Mata Kuliah Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial. Ada dilema yang terkandung secara implisit yang mungkin muncul dalam mata kuliah ini adalah, bagaimana mengintegrasikan nilai dan etika Islam dalam ilmu Kesejahteraan Sosial. Hal inilah yang menarik dan perlu dieksplorasi lebih jauh, mengingat ilmu Kesejahteraan Sosial adalah ilmu terapan yang tentu akan sangat bersinggungan dengan nilai dan etika di dalamnya.

### Argumen Integrasi-Interkoneksi

Islam dan kesejahteraan sosial merupakan dua entitas yang berbeda. Pertama adalah sebuah keyakinan, yang dengan pengikutnya dijadikan sebagai pedoman, rujukan, sumber segala tindakan yang dilakukannya. Bagi seorang muslim, Islam merupakan sumber nilai yang darinya dia tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai tersebut, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Karenanya Islam berarti berserah diri, karena pengikutnya (muslim) disyaratkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sidi Gazalba menggambarkan kondisi ini sebagai berikut; dalam tiap tindakan dan laku perbuatannya, muslim itu berserah diri kepada Tuhan (karena itulah ia disebut muslim). Hal ini berarti "terserah nilai apa

<sup>12</sup> Kanya, "Indigeniasasi Pekerjaan Sosial", ... hal. 41

<sup>13</sup> Beberapa tahun sebelum dibukanya prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) pada tahun 2009, sebenarnya telah dibuka konsentrasi Kesejahteraan Sosial di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) pada tahun 2004. Dengan dibukanya IKS sebagai prodi tersendiri, maka konsentrasi ini pun ditutup.



yang telah ditentukan Tuhan, maka tindakan dan laku perbuatannya digerakkan oleh nilai itu dan bertujuan mewujudkannya".<sup>14</sup> Gazalba melanjutkan, bahwa disinilah terletak perbedaan kebudayaan Islam daripada kebudayaan-kebudayaan lain dalam hal tata nilai. Dalam kebudayaan Islam, ketentuan tata nilai itu oleh *naql*, aplikasinya oleh akal. Sedangkan kebudayaan-kebudayaan umumnya oleh akal.<sup>15</sup>

Maka entitas kedua, kesejahteraan sosial, adalah entitas yang termasuk dalam kategori kebudayaan menurut Gazalba. Ilmu kesejahteraan sosial sebagai produk kebudayaan, merupakan kesatuan tata nilai yang bersumber dari akal. Sedangkan tata nilai Islam, dibangun oleh *naql*, meskipun diaplikasikan dalam tataran budaya masyarakat dengan menggunakan akal. Pada titik inilah terletak perbedaan keduanya. Sebagai ilmu terapan, ilmu kesejahteraan sosial juga bukan sekedar produk kebudayaan, melainkan juga berperan aktif dalam membangun kebudayaan. Dengan demikian, Islam dan kesejahteraan sosial bertemu pada satu titik, di mana keduanya sama-sama diaplikasikan dalam membangun kebudayaan. Pada titik inilah ada peluang untuk mengintegrasikan Islam dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Pendekatan *integratif* yang dimaksud di sini adalah terpadunya kebenaran wahyu (*burhan ilahy*) dalam ilmu kesejahteraan sosial, akan tetapi bukan berarti terjadi peleburan antara kedua entitas ini dalam sebuah bangunan ilmu yang identik, melainkan terpadunya karakter, corak dan hakikat antar ilmu tersebut dalam semua kesatuan dimensinya.<sup>16</sup> Adapun pendekatan interkonektif mengandung makna terkaitnya nilai dan etika Islam dalam Ilmu kesejahteraan Sosial, melalui satu hubungan yang saling menghargai dan saling mempertimbangkan.<sup>17</sup> Dalam hal ini, nilai dan etika Islam memberi legitimasi religious serta memperkaya khasanah keilmuan kesejahteraan sosial dalam berbagai dimensinya.

### Islam Sebagai Sumber Nilai

Bahasan tentang nilai di sini, dimaknai sebagai sesuatu yang abstrak dan implisit. Berada dalam alam pikiran manusia, membentuk

<sup>14</sup> Sidi Gazalba, *Sistimatika Filsafat, Pengantar kepada Teori Nilai*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, tt.), hal. 453.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 453.

<sup>16</sup> Pokja Akademik, *Kerangka Dasar Keilmuan & Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hal. 26.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 26



kepercayaan dan sikap<sup>18</sup>, sehingga menjadi sesuatu yang diyakini oleh seseorang dan mendorongnya melakukan suatu tindakan tertentu. Dengan demikian, nilai berfungsi sebagai panduan perilaku seseorang<sup>19</sup>, karena nilai merupakan motif yang melatarbelakangi mengapa suatu tindakan dilakukan. Misalnya, seseorang yang senantiasa mandi pagi, tindakannya (mandi pagi) itu didorong oleh keyakinan yang ada pada dirinya bahwa mandi pagi itu dapat membuatnya menjadi sehat, bersih dan segar. Karenanya, bila tidak ada alasan yang mendasar—seperti sakit misalnya—ia tidak akan pernah mandi pagi. Keyakinan akan pentingnya mandi pagi ini begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang, dan bila suatu saat ketika ia tidak mandi pagi, akan terasalah olehnya sesuatu yang berbeda, tubuhnya terasa tidak bersih, tidak semangat dan tidak segar.

Motif suatu tindakan seseorang sangatlah berbeda antara satu dengan lainnya. Dalam sebuah literatur dikatakan bahwa standar yang mendorong orang melakukan sesuatu sangat beragam, sekurang-kurangnya ada 5 alasan, yakni 1) sosialisme, 2) hedonisme, 3) vitalisme, 4) humanisme, dan 5) religioisisme.<sup>20</sup> Dari sekian motif tersebut, motif keagamaan adalah sebaik-baik motif seseorang melakukan tindakan. Karena motif keagamaan membedakan nilai-nilai kebaikan yang dikandung dalam suatu tindakan. Motif keagamaan memiliki dua sisi kebaikan, yakni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Motif keagamaan sangatlah kuat daya dorongnya, bahkan terkadang menjadi sulit dirasionalisasi. Bagaimana akal bisa menerima penjelasan dari seseorang yang dengan sukarela mati dalam medan pertempuran. Hanya nilai-nilai keagamaanlah yang dapat menjelaskannya.

Sebagai sebuah ilmu terapan, yang ilmunya dapat langsung diaplikasikan guna menyelesaikan masalah-masalah sosial, ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu yang sarat dengan nilai. Apabila dihubungkan dengan pekerjaan sosial, maka nilai yang dimaksud disini adalah seperangkat prinsip etik/moral yang fundamental di mana pekerja sosial harus berkomitmen.<sup>21</sup> Artinya, prinsip-prinsip etik tersebut menjadi pedoman, acuan atau tuntunan pekerja sosial dalam bekerja.

<sup>18</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 136.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 136.

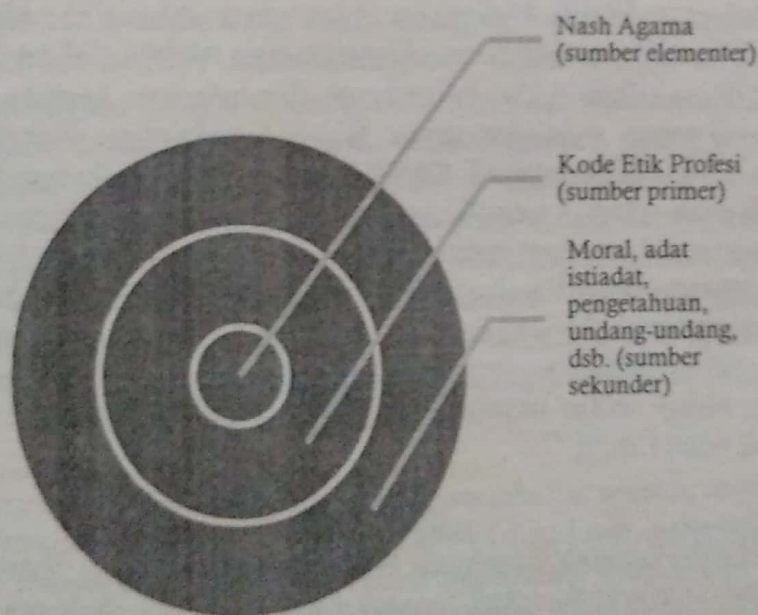
<sup>20</sup> Ahmad Farid Mubarak, *Teori-teori Kebenaran: Korespondensi, Koherensi, Pragmatik, Struktural Paradigmatik, dan Performatik*. <http://defaultride.wordpress.com/2010/06/28/teori-teori-kebenaran-korespondensi-koherensi-pragmatik-struktural-paradigmatik-dan-performatik/>. Diakses 20 Oktober 2017.

<sup>21</sup> Sarah Banks, *Ethics and Values in Social Work*, (2nd ed), (New York: Palgrave, 2001), hal. 6.



Dalam praktiknya, terdapat beberapa nilai yang turut mempengaruhi dan memberikan kontribusi dalam menerapkan ilmu ini. Nilai-nilai tersebut adalah nilai pribadi pekerja sosial, nilai lembaga, nilai profesi pekerjaan sosial, nilai pribadi klien, dan nilai masyarakat.<sup>22</sup> Nilai-nilai inilah yang saling tarik-menarik dan pada titik tertentu menemukan komprominya sebagai bagian dari solusi masalah sosial yang diselesaikan.

Nilai pribadi pekerja sosial yang dimaksud pada bahasan ini merupakan akumulasi dari berbagai sumber nilai yang kemudian membentuk kepribadian pekerja sosial. Nilai-nilai dimaksud yakni pengetahuan pekerja sosial, pengalaman, nilai-nilai yang disepakati keluarga, serta nilai agama yang diyakini oleh pekerja sosial. Sementara itu, Islam menempatkan nilai-nilai agama dalam posisi yang istimewa. Ia menjadi pedoman, tuntunan, petunjuk dan sumber rujukan bagi seorang muslim, kapanpun dan dimanapun, apapun profesi pemeluknya. Oleh karenanya, betapapun banyaknya nilai-nilai yang saling bernegosiasi pada diri seorang pekerja sosial, akan tetapi nilai-nilai agama (Islam), hendaknya menjadi sumber mendasar bagi seorang pekerja sosial Muslim dalam bekerja, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar: Kedudukan Sumber Nilai  
 Sumber: Noorkamilah, "Integrasi Nilai-Nilai Islam", hal. 160.

<sup>22</sup> Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, (Kopma STKS Bandung, 1991), hal. 88-99.



Penjelasan mengenai gambar tersebut di atas adalah bahwa agama dalam hal ini *nash* al-Qur'an dan Sunnah, menjadi sumber elementer, karena benar tidaknya suatu tindakan seorang Muslim diatur dari sesuai atau tidaknya tindakan tersebut dengan *nash* yang dijadikan landasan dalam praktik. Praktik yang tidak berlandaskan pada *nash* agama ini, menjadi praktik yang sia-sia dalam bahasa agama. Sementara itu, Kode Etik Profesi menjadi sumber primer, karena dengan itulah profesionalisme pekerja sosial diukur. Sedangkan adat istiadat masyarakat, undang-undang dan sebagainya menjadi sumber sekunder, karena sumber ini tidak selalu digunakan, melainkan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja, sumber-sumber yang biasanya dikonstruksi oleh budaya setempat ini diperlukan.<sup>23</sup>

### Islam Sebagai Etika hidup

Islam sebagai sumber nilai, menuntut pelakunya agar dapat beretika secara Islam. Perjumpaan Islam dengan kesejahteraan sosial sebenarnya bertemu di level ini, level praktis, ketika nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup itu diaplikasikan dalam wujud tindakan. Etika itu sendiri dimaknai sebagai aplikasi nyata dari nilai.<sup>24</sup> Ia merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang diyakini seseorang. Maka etika dapat dilihat, nyata, eksplisit, konkrit,<sup>25</sup> karenanya dapat dinilai benar atau salah. Dalam bahasa agama (Islam), etika sepadan dengan *akhlaq*.<sup>26</sup>

Dalam bahasan mengenai etika atau *akhlaq* ini, secara tegas menyatakan bahwa Islam menggambarkan dengan rinci bagaimana perilaku Rasulullah SAW betul-betul disandarkan kepada al-Qur'an. Artinya, segenap perilaku umat Islam hendaknya merujuk kepada perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan yang perlu dicontoh oleh seluruh pengikutnya tanpa kecuali. Meskipun demikian, pembahasan Islam mengenai *akhlaq*, mencakup hal-hal berikut; 1) *Akhlaq* kepada sang *Khaliq* (Allah SWT, Pencipta), 2) *Akhlaq* kepada makhluk (ciptaan). *Akhlaq* kepada makhluk dirinci lagi menjadi beberapa macam, yakni 1) *akhlaq* terhadap sesama manusia, 2) *akhlaq* terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta 3) *akhlaq* benda mati.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Noorkamilah, "Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Praktik Pekerjaan Sosial", dalam Waryono, (dkk), *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial, Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012), hal. 161.

<sup>24</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial*,... hal. 136.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 136.

<sup>26</sup> Marzuki, *Prinsip Dasar Akhlaq Mulia*, (Yogyakarta: Debut Wahana Press & FISE UNY, 2009), hal. 8.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 22.



Ilmu Kesejahteraan Sosial yang objek materinya adalah manusia, maka perjumpaannya dengan etika Islam adalah pada bahasan mengenai etika kepada manusia lain. Tuntunan etika Islam dalam membangun interaksi dengan manusia lain seperti yang telah dicontohkan dengan amat sempurna oleh Rasulullah SAW. Singkatnya, tindakan atau perilaku yang dijalankan seorang Muslim hendaknya dapat diterima secara objektif oleh khalayak sebagai sebuah kebaikan. Di sisi lain juga seorang Muslim tidak dapat melepaskan diri dari etika terhadap Rasul dan Tuhan-Nya. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan—meskipun nampak objektif dalam pandangan khalayak—harus senantiasa mempertimbangkan etika terhadap sang Khaliq dan Rasulnya. Konteks ini memiliki arti bahwa motif dari tindakan yang dilakukan harus berupaya sesuai dengan nilai agama yang sifatnya subjektif.

Konsep ini sejalan dengan nilai objektifikasi yang dibangun dalam kerangka acuan pemikiran Kuntowijoyo.<sup>28</sup> Dalam bukunya, Kuntowijoyo menjelaskan bahwa, kata objektifikasi berasal dari kata objektif, jadi artinya *'the act of objectifying'*—'membuat sesuatu menjadi objektif'. Sesuatu itu objektif apabila keberadaannya tidak tergantung pada pikiran pelaku atau subjek, tetapi berdiri sendiri secara independen. Jadi, bila A adalah objektifikasi dari B, maka berarti A adalah B yang telah dibuat objektif oleh pelaku atau subjek.<sup>29</sup> Objektifikasi menterjemahkan nilai-nilai internal ke dalam kategori yang bersifat objektif.<sup>30</sup> Dengan kata lain, objektifikasi adalah sebuah narasi yang konkrit dari keyakinan internal.

Dalam bahasa yang lain, dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan disebut objektif apabila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-Islam sebagai sesuatu yang natural (sewajarnya)—tidak sebagai perbuatan keagamaan. Sekalipun demikian, dari sisi yang mempunyai perbuatan, boleh jadi tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan, termasuk amal. Lebih lanjut Kuntowijoyo menjelaskan bahwa objektifikasi adalah perbuatan rasional-nilai (*wetrational*) yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati

<sup>28</sup> Di antara buku Kuntowijoyo yang membahas tentang objektifikasi ini dapat ditemukan dalam buku *Identitas Politik Umat Islam*, yang terbit pada tahun 1999. Dalam buku ini Kuntowijoyo membahas konsep objektifikasi secara lebih mendetail dibanding buku-buku lainnya. Pada tahun 2001, terbit buku *Muslim Tanpa Masjid*, yang juga membahas konsep objektifikasi. Buku terakhir Kuntowijoyo yang membahas objektifikasi adalah dalam buku *Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi dan Etika*, yang terbit pada tahun 2005.

<sup>29</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 301.

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 67.



tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Kuntowijoyo mencontohkan 'kesetiakawanan nasional' sebagai objektifikasi dari ajaran Islam tentang *ukhuwah*. Oleh karena itu, objektifikasi akan terlihat di dalam suatu tindakan yang dibuat objektif oleh pelaku atau subjek.<sup>31</sup>

Sebagai contoh implementasi dari konsep ini, misalnya, ada konsep zakat dalam Islam, yang diwajibkan kepada pemeluknya yang sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sebagian rizkinya dengan jumlah tertentu yang telah ditentukan. Dalam syariat lalam jelas adanya aturan seseorang untuk mengeluarkan hartanya. Nah, ketika harta tersebut dikeluarkan dan diberikan kepada kaum fakir miskin, maka tindakannya itu dalam membantu fakir miskin, adalah tindakan yang secara objektif dapat diterima oleh khalayak umum sebagai sebuah tindakan kebajikan. Dengan demikian, motif atau dorongan seseorang melakukan tindakan boleh saja bersifat subjektif (motif keagamaan), akan tetapi sebagai sebuah tindakan yang nyata, nampak, konkrit, hal itu dapat dinilai sebagai kebenaran yang objektif. Inilah yang dimaksud dengan konsep objektifikasi tersebut.

Sebuah contoh objektifikasi dalam konteks pekerjaan sosial dapat dilihat dari pentingnya menjadi seorang pekerja sosial. Sebagai seorang pekerja sosial bukanlah sekedar panggilan jiwa yang tidak berdasar, melainkan secara eksplisit terdapat dalam al-Quran sebagai perintah dari Allah SWT. Hal ini dapat dicermati dari sebuah ayat al-Qur'an, surat an-Nisa [4] ayat 75, yang artinya:

"mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah (dan tertindas) baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"

Pesan umum yang disampaikan oleh ayat ini adalah perintah untuk berjuang membebaskan mereka yang berada dalam ketertindasan dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk membebaskan dirinya selain mengharap pertolongan.<sup>32</sup> Hal ini seyogyanya menjadi dasar pijakan bagi para pekerja sosial, bahwa kerja-kerja profesi pekerjaan sosial dengan melakukan pembelaan terhadap kaum *mustadh'afien* itu diperintahkan oleh Allah.

Bila dikaitkan dengan konsep Islam secara umum, konsep

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 67-69.

<sup>32</sup> Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas, Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afien dengan Pendekatan Keindonesiaan*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 89.



objektifikasi tersebut diatas akan sangat seiring sejalan dengan apa yang tersurat dalam al-Qur'an, dalam QS. al-Anbiya ayat 107 yang artinya "Tidaklah Aku mengutus engkau Muhammad, kecuali sebagai Rahmatan lil'alamin" (QS. al-Anbiya: 107). Tafsir sederhana dalam ayat tersebut, bahwa kehadiran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW bukanlah sekedar untuk kebahagiaan dan kemaslahatan pemeluknya saja, melainkan Islam dihadirkan Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam, tanpa terkecuali. Di mana konsepsi Islam, apapun syariatnya, akan dapat dirasakan sebagai sebuah kedamaian bagi seluruh makhluk di bumi.

Amr khaled, dalam bukunya menjelaskan bahwa, ada korelasi yang erat antara akhlaq dan rahmat. Bahwa tidak ada rahmat bagi alam semesta kecuali dengan akhlaq.<sup>33</sup> Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa rahmat hanya akan ada pada orang atau masyarakat yang menegakkan akhlaq yang mulia. Rahmat tak akan mungkin hadir dalam perilaku kesombongan, pertengkaran, amarah, permusuhan, penelantaran, kekerasan, dan lain-lain. Rahmat hanya akan mungkin muncul dalam harmoni, saling tolong menolong, saling membantu dan bekerjasama dan sebagainya.

### Penutup

Dalam tulisan sederhana ini, saya menyimpulkan bahwa Ilmu Kesejahteraan Sosial walaupun lahir di negara Barat, lebih khususnya Amerika dan Eropa, bila masuk ke dalam ranah pendidikan di Indonesia, terlebih di bawah wadah *Islamic Studies*, sejatinya dapat diterima dengan baik. Argumen integrasi-interkoneksi yang menjadi ikon UIN Sunan Kalijaga menjadi sebuah keniscayaan yang hakiki menerima semua ilmu sebagai *core values*-nya yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang berbasis nilai Islami, Ilmu Kesejahteraan Sosial, walaupun di bawah naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang secara hakikat rumpun studi masuk ke dalam ranah *Islamic Studies*, mampu menerima kajian tersebut, di mana Islam sebagai sumber nilai bagi berjalannya studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Konteks ini dapat dilihat dalam kajian yang serupa dalam proses objektifikasi nilai-nilai Islam. Di mana objektifikasi nilai Islam mampu diintegrasikan ke dalam metode pembelajaran dan menjadi sumber nilai etika pekerja sosial pada saat mereka bekerja di masyarakat. Dengan demikian, pekerja sosial bukan hanya dipandang sebagai sebuah pekerjaan biasa, tapi harus menjadi sebuah profesi bagi pelakunya. Sebagai pelaku pekerja sosial, maka ia harus melihat bahwa spirit Islam

<sup>33</sup> Amr Khaled, *Buku Pintar Akhlaq, Membantu Anda Berkepribadian Muslim dengan Lebih Asyik, Lebih Otentik*, cet. IV, Terj. Fauzi Faishal Bahreisy, (Jakarta: Zaman, 2012), hal. 4.



Noorkamilah

sebagai nilai yang mencerminkan akhlak harus senantiasa menjadi ranah aplikatif pada setiap tindakan intervensi penyandang masalah sosial.



## Daftar Pustaka

- Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas, Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afien dengan Pendekatan Keindonesiaan*, cet. 2, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008).
- Ahmad Farid Mubarak, *Teori-teori Kebenaran: Korespondensi, Koherensi, Pragmatik, Struktural Paradigmatik, dan Performatik*. <http://defaultride.wordpress.com/2010/06/28/teori-teori-kebenaran-korespondensi-koherensi-pragmatik-struktural-paradigmatik-dan-performatik>. Diakses 20 Oktober 2017.
- Amr Khaled, *Buku Pintar Akhlaq, Membantu Anda Berkepribadian Muslim dengan Lebih Asyik, Lebih Otentik*, Cet. IV, Terj. Fauzi Faishal Bahreisy, (Jakarta: Zaman, 2012).
- Budi Rahman Hakim, *Rethinking Social Work Indonesia: Suatu Jelajah Kritis*, (Jakarta: RM Books, 2010).
- Charles Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare, Empowering People* (USA: Brrook/cole, Thompson Learning, 2004).
- Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, (Kopma STKS Bandung, 1991).
- Kanya Eka Santi, "Indigenisasi Pekerjaan Sosial", dalam Salim Segaf Al-Jufri, *Pekerjaan Sosial di Indonesia, Sejarah dan Dinamika perkembangan*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012).
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1999).
- \_\_\_\_\_, *Muslim Tanpa Masjid*, (Bandung: Mizan, 2001).
- Marzuki, *Prinsip Dasar Akhlaq Mulia*, (Yogyakarta, Debut Wahana Press & FISE UNY, 2009).
- Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan Sosial, Paradigma dan Teori*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012).
- \_\_\_\_\_, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Noorkamilah, "Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Praktik Pekerjaan Sosial", dalam Waryono, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan*



Noorkamilah

*Sosial, Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2012).

Pokja Akademik, *Kerangka Dasar Keilmuan & Pengembangan kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006).

Sarah Banks, *Ethics and Values in Social Work*, (2nd ed), (New York: Palgrave, 2001).

Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat, Pengantar kepada Teori Nilai*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, tt.).

T. Sumarmonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: PT Hanindita, 1987).